

**EVALUASI SPASIAL KESESUAIAN LOKASI RUMAH SAKIT
DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT**

**SPATIAL EVALUATION OF HOSPITAL LOCATION
SUITABILITY IN MAMUJU REGENCY WEST SULAWESI**

ASBI SAMLI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021

**EVALUASI SPASIAL KESESUAIAN LOKASI RUMAH SAKIT
DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

ASBI SAMLI

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS
EVALUASI SPASIAL KESESUAIAN LOKASI RUMAH SAKIT
DI KABUPATEN MAMUJU SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh

ASBI SAMLI
Nomor Pokok P022191008

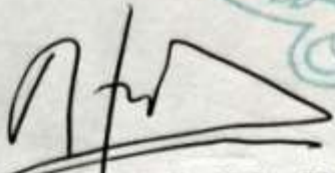
telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

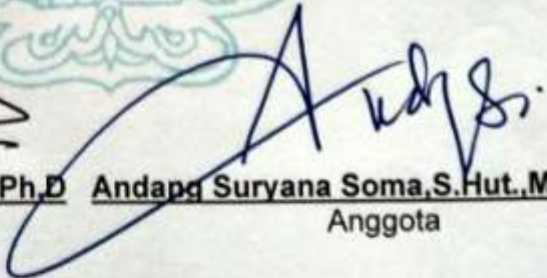
pada tanggal 19 Januari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

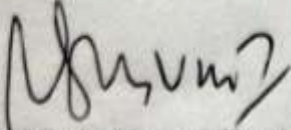
Komisi Penasehat,



Prof. Dr. H. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D
Ketua


Andang Suryana Soma, S.Hut., MP., Ph.D
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng


Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asbi Samli

Nomor mahasiswa : PO22191008

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan



Asbi Samli
Asbi Samli

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan Semesta Alam berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis selalu mengirimkan Salam dan Shalawat kepada junjungan Umat Islam Rasulullah Muhammad Shallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini untuk melakukan kajian evaluasi lokasi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju khususnya fasilitas rumah sakit. Penulis bermaksud melakukan penelitian ini untuk menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait lokasi rumah sakit apakah telah sesuai secara spasial atau tidak. Melalui penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pelayanan kesehatan masyarakat kedepannya.

Seiring dengan waktu, proses penelitian ini tentu saja mengalami banyak kendala baik itu pada saat pengambilan data, proses analisis dan sebagainya namun berkat Rahmat Allah kemudian atas bantuan bimbingan dari Dewan Pembimbing yang diketuai oleh Prof. dr. H. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D dan Andang Suryana Soma, S.Hut.,M.P.,Ph.D, sebagai anggota akhirnya tesis dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai target yang diinginkan penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan motivasi, waktu, tenaga, materi kepada kedua orang tua penulis Bapak Sampara Ili, M.BE dan Ibu Hj. Nurati, Sos., dan kepada isteri penulis

Sabriani Bakri, ST, kepada kedua mertua penulis Bapak Bakri, S.Pd dan Ibu Datu Pasau yang ikut serta telah banyak membantu serta kepada saudara-saudara penulis yakni : Asri Sarli, ST.MT, Asniati, SE,MM, Astianti.Amd, Asdi Sadli, S.Pd,ST, Asfiriati, S.Kep. Ners, Asril Sapli, S.IP dan Siti Nurdiah Bakri.

Ucapan terima kasih juga kepada Pemerintah Sulawesi Barat yang telah memberikan kami kesempatan beasiswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang magister di Universitas Hasanuddin dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Barat Bapak Drs. H. Andi Ali Baal Masdar M.Si. Tidak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Bapak Dr. Muhammad Idris DP yang turut banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis. Begitupula ucapan terima kasih kepada Bapak H. Zulkifli Manggazali SE.,M.S, serta kepada Bapak Muhammad Hisyam Said S.Sos., M.Si. Kabid Formasi dan Pengadaan Pegawai dan Ibu Roslina S.Pdi., M.Si. kasubid Pengembangan pegawai serta para staf BKD yang telah ikut banyak membantu dalam proses studi penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis juga kepada Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Dekan Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng dan Ketua Pemintana Otonomi Daerah sekaligus salah satu dewan penguji Prof. Dr. Idayanti Nursyamsi, SE., M,Si, beserta Dewan Penguji lainnya yakni Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair,

MS dan Dr. Agus Bintara Birawida, S.Kei., M.Kes serta para dosen pengampu yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

Begitu pula penulis juga ucapkan banyak terima kasih kepada para mahasiswa ASN utusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang yang menjalani program tugas belajar tahun 2019 di Universitas Hasanuddin, kemudian ucapan terima kasih kepada mahasiswa Perencanaan Pengembangan Wilayah secara keseluruhan dan terkhusus untuk mahasiswa pemintan Otonomi Daerah tahun 2019, Begitu pula ucapan terima kasih kepada para staf akademik yang turut membantu dalam proses penyelesaian studi penulis di Universitas Hasanuddin terkhusus Kak Umi, Ibu Fani, ibu Ida, semua staf, serta para *security* dan *cleaning service* yang dengan sabar dan tidak bosan-bosannya melayani mahasiswa dengan tulus dan ikhlas. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tesis ini tentu saja tidaklah sempurna masih banyak kekurangan di sana sini namun penulis berharapa dengan tesis ini menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi peneliti selanjutnya dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju serta bagi Pemerintah Daerah Lainnya.

Makassar, Januari 2021

Asbi Samli

ABSTRAK

ASBI SAMLI. *Evaluasi Spasial Kesesuaian Lokasi Rumah Sakit Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (dibimbing oleh Veni Hadju dan Andang Suryana Soma).*

Penelitian ini bertujuan (1) menilai kondisi aksesibilitas lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju, (2) menilai potensi rawan bencana lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju, (3) menilai kondisi kebijakan dan regulasi terkait lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju, (4) menilai kesesuaian lokasi lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju saat ini ditinjau dari aspek spasial. (5) arahan pengembangan lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini dilaksanakan pada 4 rumah sakit yang berlokasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aksesibilitas, potensi rawan bencana, kebijakan dan regulasi. Teknik analisis yang digunakan *Overlay Analysis*, *Euclidean Distance* dan *Boolean Analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak rumah sakit ke pusat permukiman dan puskesmas berbeda-beda. Adapun jarak rumah sakit ke jaringan jalan bisa dikatakan masih dekat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapatkan bahwa ke-4 lokasi rumah sakit berada di kawasan rawan bencana. Hasil analisis pola ruang menunjukkan hasil sebaliknya bahwa lokasi rumah sakit telah sesuai dengan peruntukannya. Begitupula dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Mamuju lokasi keempat rumah sakit saat ini berada dalam pengembangan PKNp MATABE. Jika mempertimbangkan ketiga variabel serta hasil analisis yang ada menunjukkan bahwa saat ini lokasi keempat rumah sakit berada pada lokasi yang tidak sesuai. Lokasi rumah sakit perlu ditinjau kembali apakah tetap dipertahankan atau direlokasi.



ABSTRACT

ASBI SAMLI. Spatial Evaluation of Hospital Location Suitability in Mamuju Regency, West Sulawesi (supervised by **Veni Hadju** and **Andang Suryana Soma**).

This study aims to (1) assess the accessibility condition of the hospital locations in Mamuju Regency, (2) assess the potential disaster-prone location of hospitals in Mamuju Regency, (3) assess the conditions of policies and regulations related to the location of hospitals in Mamuju Regency. (4) Assess the suitability of the current location of the hospital in Mamuju Regency in terms spatial aspects. (5) determine the directions for developing hospital locations in Mamuju Regency.

This research was conducted at 4 hospitals located in Mamuju Regency, West Sulawesi. The variables used in this research are accessibility, disaster-prone potential, policies and regulations. The analysis technique used was Overlay Analysis, Euclidean Distance and Boolean Analysis.

The results showed that the distance from hospitals to residential centers and health centers was different. As for the distance from the hospital to the road network, it can be said that it is close. Based on the results of the analysis, it was found that the 4 locations of hospital were in disaster-prone areas. The results of the spatial pattern analysis show the opposite result that the location of the hospital is in accordance with its designation. Likewise, in the spatial structure plan of the Mamuju Regency RTRW, the location of the four hospitals is currently under the PKNp MATABE development. If you consider the three variables and the results of the existing analysis show that the current location of the four hospitals is in an inappropriate location. The location of the hospital needs to be reviewed whether it is maintained or relocated.



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
1.Tujuan Umum	21
2.Tujuan Khusus.....	21
D. Kegunaan Penelitian.....	21
1.Kegunaan Teoritis	21
2.Kegunaan Praktis	21
E. Sistematika Penulisan	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Lokasi	23
B. Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25
C. Otonomi Daerah Bidang Kesehatan	26

D. Rumah Sakit.....	29
E. Lokasi Rumah Sakit	29
F. Sistem Informasi Geografis.....	32
G. Bencana Alam	34
H. Penelitian Terdahulu.....	37
I. Kerangka Konsep.....	87
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	88
A. Lokasi Penelitian.....	88
B. Waktu Penelitian.....	88
C. Variabel dan Indikator.....	89
D. Sumber Data.....	90
E. Teknis Analisis Data.....	92
1. Overlay Analysis.....	92
2. Euclidean Distance.....	92
3. Boolean Analysis.....	93
BAB IV. HASIL	95
A. Administrasi dan Geografis Wilayah.....	95
B. Kondisi Rumah Sakit dan Puskesmas.....	97
C. Kondisi Aksesibilitas.....	100
D. Potensi Rawan Bencana.....	103
E. Kebijakan dan Regulasi.....	107

F. Analisis Aksesibilitas.....	110
1. Analisis Jarak Rumah Sakit ke Permukiman	111
2. Analisis Jarak Rumah Sakit ke Puskesmas	112
3. Analisis Jarak Rumah Sakit ke Jalan	113
G. Analisis Potensi Rawan Bencana	114
1. Analisis Potensi Rawan Bencana Banjir.....	114
2. Analisis Potensi Rawan Bencana Longsor	115
3. Analisis Potensi Rawan Gempa.....	116
4. Analisis Potensi Rawan Tsunami	117
H. Analisis Kebijakan dan Regulasi	118
I. Analisis Boolean	119
BAB V. PEMBAHASAN	122
A. Kondisi Aksesibilitas	122
B. Potensi Bencana Alam	126
B. Kesesuaian Lokasi Rumah Sakit.....	129
C. Arahkan Lokasi Rumah Sakit	130
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	134
A. KESIMPULAN	134
B. SARAN	135
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

nomor		halaman
1.	Penelitian Terdahulu	37
2.	Variabel dan Indikator Penelitian.....	89
3.	Matriks Kebutuhan Data dan Instansi Sumber Data	91
4.	Sebaran Rumah Sakit di Kabupaten Mamuju	98
5.	Sebaran Puskesmas di Kabupaten Mamuju	98
6.	Nilai setiap kategori Potensi Rawan Bencana.....	119
7.	Nilai setiap kategori Pola Ruang	120

DAFTAR GAMBAR

nomor		halaman
1.	Overlay Analisis (ESRI 2020b)	92
2.	Euclidean Distance (ESRI 2020a)	93
3.	Boolean Analysis (ESRI 2020a)	94
4.	Peta Administrasi Kabupaten Mamuju	96
5.	Peta Topografi Kabupaten Mamuju	97
6.	Peta Sebaran Rumah Sakit di Kabupaten Mamuju Tahun 2020	98
7.	Peta Sebaran Puskesmas di Kabupaten Mamuju Tahun 2020	100
8.	Peta Rencana Struktur Ruang	103
9.	Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Mamuju	106
10.	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Mamuju	106
11.	Peta Rawan Bencana Banjir dan Tsunami Kabupaten Mamuju	107
12.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mamuju	109
13.	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mamuju	110
14.	Peta analisis jarak rumah sakit ke permukiman	111
15.	Peta Analisis Jarak Rumah Sakit ke Puskesmas	112
16.	Peta Analisis jarak rumah sakit ke jalan	113
17.	Peta Analisis Potensi Rawan Bencana Banjir	114
18.	Peta Analisis Potensi Rawan Bencana Longsor	115
19.	Peta Analisis Potensi Rawan Bencana Gempa	116
20.	Peta Analisis Potensi Rawan Tsunami	117
21.	Peta Analisis Pola Ruang RTRW Mamuju 2019-2039	118
22.	Peta kesesuaian lokasi rumah sakit	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren adalah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren terbagi atas dua yaitu, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib kemudian terbagi lagi mencakup dua urusan yaitu, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2014 menetapkan salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan bidang Pelayanan Dasar adalah terkait bidang kesehatan. Kewajiban pemerintah daerah ini sangat sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 34 ayat (3) yaitu, Negara

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan hal itu maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk warganya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam ketersediaan fasilitas kesehatan, menciptakan lingkungan yang sehat, ketersediaan tenaga medis, informasi kesehatan dan kemudahan aksesibilitas. Namun dalam perkembangannya tujuan UUD 1945 dan UU No. 23 tahun 2014 yang dilaksanakan pemerintah daerah saat ini ternyata masih jauh dari harapan. Masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai sektor kesehatan.

Amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kesehatan minimal kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman dan bermutu serta tidak diskriminatif.

Semenjak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat tahun 2004 menjadi daerah otonomi sendiri, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibukota Provinsi. Penetapannya sebagai ibukota sangat berpengaruh signifikan terhadap dinamika pembangunan di Kabupaten Mamuju. Salah satunya adalah semakin derasnya arus migrasi penduduk dan jumlah kelahiran.

Dampak penambahan penduduk yang ini perlu diikuti dengan pembangunan fasilitas pelayanan dasar yang memadai yang didukung dengan pelayanan publik yang prima tentunya, khususnya dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan yang berkualitas, pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas akan berpengaruh kepada kualitas kesehatan masyarakat (Yulianto, Hayati, and Aji 2016). Pertambahan penduduk yang pesat yang tidak dibarengi oleh fasilitas kesehatan yang memadai akan berpotensi terjadinya peningkatan jumlah kematian (Sutaryo and Nugroho 2020).

Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan penduduk saat ini adalah rumah sakit. Peningkatan jumlah penduduk selaras dengan peningkatan kebutuhan rumah sakit. Olehnya itu diperlukan lokasi rumah sakit yang sesuai agar dapat melayani semua kebutuhan penduduk (Purnomo, Subiyanto, and Nugraha 2017).

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Mamuju bisa dikatakan cukup baik. Di Kabupten Mamuju sendiri terdapat 4 rumah sakit umum. Begitu pula puskesmas hampir ada di setiap kecamatan, praktek dokter dan apotik pun sudah sangat banyak. Namun banyaknya jumlah fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Mamuju masih dianggap oleh sebagian masyarakat tidak sejalan dengan pemerataan pelayanannya. Mereka menganggap lokasi rumah sakit yang ada saat ini masih terlalu sulit untuk diakses terutama untuk masyarakat kepulauan dan pegunungan. Hal itu tentu saja bertentangan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Pelayanan pada fasilitas rumah sakit erat kaitannya dengan tingkat kepuasan pasien. Semakin tinggi tingkat kepuasan pasien semakin baik pula pelayanan yang telah dilakukan pasien. Beberapa peneliti telah memasukkan variabel lokasi penelitian mereka dan hasilnya lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Hal itu dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Savitri, Hidayat, and Dewi 2015) di Rumah Sakit Lestari Raharja Kota Magelang dan penelitian yang dilakukan oleh (Vebnia, Pradhanawati, and Nurseto 2013) di Rumah Sakit Muhammadiyah Semarang yang menunjukkan bahwa variabel lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh (Yulinda, Saryadi, and Prabawani 2016) di Rumah Sakit Permata Medika Semarang menunjukkan bahwa variabel lokasi juga menjadi salah satu pertimbangan pasien dalam keputusan penggunaan jasa rumah sakit.

Pemilihan dan penentuan lokasi harus dipertimbangkan secara cermat dan tepat karena jika penentuan suatu lokasi dilakukan secara tepat maka diharapkan sebuah kegiatan akan berlangsung efektif dan efisien dan sebaliknya jika salah menentukan lokasi maka dikhawatirkan sebuah kegiatan akan tidak produktif dan tidak efisien (Adisasmita 2014). Kebutuhan penduduk terkait rumah sakit akan terpenuhi dengan baik apabila lokasi rumah sakit telah berada lokasi yang sesuai (Purnomo, Subiyanto, and Nugraha 2017).

Lokasi sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan rumah sakit. Rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang mempunyai aksesibilitas, keamanan dan kenyamanan yang baik. Aksesibilitas terkait jangkauan pelayanan masyarakat ke rumah sakit sedangkan keamanan dan kenyamanan terkait dengan kawasan yang aman dari bencana alam.

Terkait hal ini pemerintah yang berperan sebagai penentu lokasi (*locator*) yang mempunyai kewenangan dan kebijaksanaan. Kewenangan dan kebijaksanaan tersebut adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang secara geografis tersebar dalam tata ruang dapat dimaksimalkan pelayanannya dengan cara penyebaran fasilitas pelayanan secara merata (Mahi 2018).

Beberapa penelitian terkait kesesuaian lokasi pernah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan (Purnomo, Subiyanto, and Nugraha 2017) dengan judul Analisis potensi peruntukan lahan rumah sakit dinilai dari aspek fisik dan kebutuhan penduduk dengan sistem informasi geografis di Kota Semarang oleh dengan variabel demografi, tata guna lahan, aksesibilitas, dan lingkungan dan penelitian yang dilakukan oleh (Aghnia et al. 2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pola Sebaran Sarana dan Prasarana Kesehatan Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal 2016 dengan variabel masyarakat dan sarana dan prasarana kesehatan. Jika melihat kedua penelitian tersebut faktor kebijakan dan regulasi belum dijadikan variabel yang dikaji padahal kebijakan dan regulasi adalah hal yang sangat penting

untuk dipertimbangkan terutama terkait Rencana Tata Ruangnya apalagi di era otonomi daerah ini.

Menurut (Magita 2020), lokasi yang baik adalah lokasi yang sesuai dengan konsep tata ruang yang diatur oleh pemerintah. Hal itu juga selaras dengan pendapat Suryani (2015) dalam (Ibrahim, Rifin, and Djohar 2018) yang berpendapat bahwa hal yang sangat mempengaruhi penentuan lokasi adalah faktor kebijakan dan peraturan pemerintah. Berdasarkan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan variabel kebijakan dan regulasi dalam penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi aksesibilitas lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju ?
2. Bagaimana potensi rawan bencana lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju ?
3. Bagaimana kondisi kebijakan dan regulasi terkait lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju ?
4. Apakah lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju saat ini telah sesuai ditinjau dari aspek spasial ?
5. Bagaimana arahan lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju kedepannya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pelayanan rumah sakit dilihat dari aspek lokasinya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menilai kondisi aksesibilitas lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju.
2. Menilai potensi rawan bencana lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju.
3. Menilai kondisi kebijakan dan regulasi terkait lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju.
4. Menilai kesesuaian lokasi lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju saat ini ditinjau dari aspek spasial.
5. Arahkan pengembangan lokasi rumah sakit di Kabupaten Mamuju.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah khususnya pada peminatan Otonomi Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian dan pedoman bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, khususnya dalam penentuan lokasi rumah sakit yang ideal.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terkait Evaluasi Spasial Kesesuaian Lokasi Rumah Sakit di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, berisi kajian pustaka, yang menguraikan tentang studi literatur yang menjadi landasan teori untuk memberikan acuan, pedoman, dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III, berisi tentang metodologi penelitian. Secara umum menguraikan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, variabel dan indikator penelitian dan teknik analisis data

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian yang memberikan gambaran mengenai administrasi dan geografis wilayah, kondisi rumah sakit dan puskesmas, kondisi aksesibilitas, potensi rawan bencana, kebijakan dan regulasi

BAB V, berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang analisis yang terkait dengan analisis aksesibilitas, analisis potensi rawan bencana, analisis kebijakan dan regulasi, analisis kesesuaian lahan dan analisis arahan lokasi

BAB VI, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Lokasi

Menurut Kamus Penataan Ruang lokasi adalah tempat untuk kegiatan tertentu (pabrik, rumah, pelabuhan, dsb) (Direktorat Jendral Tata Ruang & Kementrian Agraria dan Tata 2009). Teori lokasi adalah ilmu yang mengkaji tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang mengkaji alokasi geografis sumber-sumber potensial serta hubungan dan pengaruhnya terhadap kegiatan yang lainnya (Tarigan 2009). Teori lokasi membahas tentang penentuan lokasi industri atau pabrik yang berada pada titik biaya terendah (*least cost*) (Adisasmita 2014). Analisis pertumbuhan ekonomi menjadikan lokasi sebagai salah satu karakteristik yang sangat penting (Fathurahman 2018).

Teori lokasi dalam perkembangannya ditentukan oleh kekuatan dan mekanisme pasar (*free market*) dengan peranan kapital dan swasta yang besar. Dalam ruang lingkup aktivitas ekonomi penentuan lokasi pembangunan ditentukan oleh para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan swasta dan pemerintah (Mahi 2018). Selanjutnya Wahi menjelaskan bahwa teori lokasi dalam perkembangannya dapat ditinjau dari beberapa teori dasar yaitu :

1. Teori Klasik

Menurut David Ricardo, penduduk akan senantiasa terus tumbuh dan tanah-tanah yang tidak subur akan dimanfaatkan dalam proses produksi sehingga sewa tanah akan sama dengan penerimaan dikurangi harga

faktor produksi. Untuk tanah di perkotaan tingginya nilai tanah dilihat dari jarak dan letak tanah bukan dari kesuburan tanah.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini menyebutkan bahwa suatu barang produksi menggunakan beberapa faktor produksi, misalnya modal, tanah dan tenaga kerja.

3. Teori Lokasi Von Thunen, Burges dan Homer Hoyt

Von Thunen mencoba menjelaskan teorinya dari berbagai jenis pertanian yang berkembang di sekeliling perkotaan yang merupakan pasar komoditas pertanian tersebut. Burges melihat pusat pasar adalah pusat kota (*Central Business Distric*). Menurut Burges CBD tempat beradanya gedung kantor, pusat pertokoan, bank dan perhotelan. Asumsinya semakin jauh dari CBD maka nilai sewa akan semakin kecil. Faktor jarak ke tempat kerja dan tempat belanja merupakan faktor utama dalam tata guna lahan diperkotaan. Hoyt berpendapat bahwa jaringan transportasi akan mampu memberikan jangkauan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih murah terhadap kawasan tersebut.

4. Teori Alferd Weber

Menurut Weber ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi suatu lokasi industri, yaitu kekuatan aglomerasi, biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Dengan asumsi biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak tempuh dan berat barang.

Lokasi erat kaitannya dengan tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu lokasi. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, faktor jarak, faktor

kondisi prasarana perhubungan, faktor sarana penghubung termasuk tingkat frekuensi, keamanan dan kenyamanannya. Lokasi dengan tingkat aksesibilitas akan berdampak kepada perkembangan guna lahan secara intensif (Tarigan 2009). Menurut (Nurbonita and Haryanto 2017), selain berdampak kepada perkembangan guna lahan, lokasi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan pusat-pusat kegiatan baru.

B. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih detail lagi pada pasal 35 ayat (1), yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 4 terdiri atas :

1. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
2. Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Klinik
4. Rumah sakit
5. Apotek
6. Unit Transfusi darah
7. Laboratorium Kesehatan
8. Optikal
9. Fasilitas Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

C. Otonomi Daerah Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 6, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Pada pasal 8 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin operasi di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab daerah masing-masing. Penentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian operasional berlaku juga untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari kegiatan penanaman modal asing.

Pada pasal 10 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam satu wilayah

Pada pasal 11 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyediakan sekurang-kurangnya satu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di setiap kecamatan dengan pertimbangan atas jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan, dan aksesibilitas. Pada pasal 12 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah klinik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam satu wilayah.

Pada pasal 13 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan untuk setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya tersedia 1 (satu) rumah sakit tipe D dan untuk setiap provinsi sekurang-kurangnya tersedia 1 (satu) rumah sakit tipe B. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah kabupaten/kota.

Pada pasal 14 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menyediakan apotek sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan klinik.

Pada pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyediakan sekurang-kurangnya satu UT unit transfusi darah (UTD) di setiap kabupaten/kota. Pada pasal 16 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, , pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan klinik.

Pada pasal 17 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab menyediakan optikal sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Pada Pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang dilakukan oleh rumah sakit atau institusi lain sekurang-kurangnya satu setiap provinsi. Penyediaan fasilitas ini harus berdasarkan penetapan oleh Menteri.

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan berdasarkan pemetaan daerah dapat menyebar secara merata di setiap wilayah kabupaten/kota.

D. Rumah Sakit

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Adapun tujuan pengaturan penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 pasal 3, yaitu :

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

E. Lokasi Rumah Sakit

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 pasal 8, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi rumah sakit, yaitu :

1. Persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan terkait kesehatan dan keselamatan lingkungan, ketentuan itu menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan terkait tata ruang, ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
3. Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit harus berdasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, demografi dan efisiensi dan efektivitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, lokasi rumah sakit memiliki beberapa persyaratan yaitu;

- 1) Lokasi rumah sakit perlu memperhatikan kontur
- 2) Lokasi rumah sakit berlokasi pada lingkungan dengan udara yang bersih bebas polusi atmosfer yang datang dari berbagai sumber dan lingkungan yang tenang bebas dari kebisingan .
- 3) Lokasi rumah sakit tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi dan rawan banjir
- 4) Lokasi Rumah sakit tidak berada di atas atau dekat dengan jalur patahan yang aktif dan rawan tsunami
- 5) Lokasi rumah sakit tidak dalam zona topan dan rawan badai
- 6) Lokasi rumah sakit tidak berada dekat dengan stasiun pemancar atau berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi.
- 7) Lokasi rumah sakit berada pada lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan daerah setempat.

- 8) Lokasi rumah sakit harus mudah dijangkau masyarakat atau dekat ke jalan raya dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah, yaitu tersedia transportasi umum, pedestrian, jalur-jalur yang aksesibel untuk disabel.
- 9) Prasarana parker dan jalan masuk jalan akan menggunakan banyak lahan. Oleh karena itu lahan parker RS yang Ideal adalah $37,5 \text{ m}^2$ s/d 50 m^2 pertempat tidur (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan) atau disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah setempat.
- 10) Rumah sakit harus memastikan ketersediaan utilitas publiknya misalnya air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon 24 jam.
- 11) Setiap rumah sakit harus dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Bab IV pasal 21 dan pasal 22 menyebutkan bahwa setiap Rumah Sakit memiliki kewajiban memiliki izin dengan salah satunya persyaratannya adalah terkait lokasi. Lokasi rumah sakit harus berada pada lahan yang sesuai rencana tata bangunan lingkungan (RTBL) kabupaten/kota, dan/atau rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat serta peruntukan lahannya untuk fungsi Rumah Sakit.

Pada pasal VI Pembinaan dan Pengawasan pasal 55 gubernur dan bupati dapat melakukan penilaian kelayakan lokasi sesuai dengan

peruntukkan dan pemenuhan persyaratan perizinan Rumah Sakit. Jika penilaian kelayakan lokasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menteri dapat memberikan teguran kepada institusi pemberi izin masing-masing Pemerintah Daerah.

F. Sistem Informasi Geografis

Definisi Sistem Informasi Geografis (SIG) hingga saat belum ada yang sifatnya baku dan sebagian besar masih bersifat definisi umum, belum lengkap, tidak presisi dan bersifat elastik. Secara terminologi setiap negara menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam mendefinisikan Sistem Informasi Geografis (SIG) ini. Amerika Serikat menggunakan terminolog *Geographic Information System*, Eropa menggunakan terminologi *Geographical Information System* dan Kanada menggunakan terminologi *Geomatique*. Menurut Rice SIG adalah sebuah sistem komputer untuk memasukkan (capturing), menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang terkait posisinya di muka bumi. Menurut Basic, SIG adalah perpaduan perangkat keras dan perangkat lunak suatu sistem komputer yang untuk mengelola, menganalisis dan memetakan informasi spasial beserta data atributnya dengan akurasi kartografis (Prahasta 2009).

Menurut Arnoff (1989) dalam (Prasetyo, Suprayogi, and Hani'ah 2018) Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang melakukan pemasukan data, manajemen data, manipulasi data dan analisis data serta keluaran data. Secara singkat Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis computer yang melakukan input data,

pengolahan data dan output data. Adapun analisis dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap masing-masing kriteria tersebut secara spasial (Debataraja, Kusnandar, and Nusantara 2018).

Adapun beberapa fungsi analisis spasial yang telah dirangkum dari Prahasta (2009) adalah sebagai berikut :

1. *Query* Basis data, berfungsi untuk memanggil kembali data atau tabel atribut tanpa mengubah atau mengedit data tersebut. Secara singkat mekanisme *query* adalah sebagai berikut :
 - a. Menklik unsur spasial;
 - b. Menklik *record* (entitas);
 - c. Memasukkan *data value*;
 - d. Memasukkan fungsi, operator logika & matematis;
 - e. Kombinasi lebih dari satu *data value*, fungsi dan operator logika matematis; dan
 - f. *Select by theme* atau *select by feature*.
2. Pengukuran, terkait jarak, luas, keliling, *Centroid*, PIP (*point of polygon*), LOF (*line of sight*), dan *Cut & Fill*.
3. Fungsi Kedekatan Unsur/Proximity, *Find Distance*, *Cost & Pathway*, *Poligon Convex-Hull*, *Assign Proximity* dan *Calculate Density*.
4. Model Permukaan digital, terkait *Gridding*, *Spatial Filtering*, *Countoring*, *Gradien/Slope*, *Aspect*, *Hillshading*, *Steepest Path*, *Profile*, *Viewshed*, dan *Watershed*.

5. *Buffer*, analisis yang menghasilkan unsur spasial yang bertipe poligon. Unsur ini merupakan area yang berjarak dari unsur spasial masukannya.
6. Klasifikasi (*reclassify*), pemetaan yang memiliki interval-interval dengan batas dan kategori tertentu.
7. Pengolahan Citra Dijital, terkait *Clustering* dan *Classification*.
8. Fungsi Editing Unsur-Unsur Spasial, terkait *Union*, *Merge*, *Combine*, *Delete*, *Erase* atau *Cut*. *Split* atau *Clip* dan *Subtract*.
9. Analisis terhadap layer Tematik, terkait *Dissolve (Aggregate)*, *Merge*, *Clip*, *Spatial Join*.
10. *Geocoding*, suatu proses untuk mendapatkan suatu lokasi unsur berdasarkan *layer* referensi.
11. *Overlay*, analisis yang menggabungkan dua *layer*/tematik. Secara umum overlay ini terbagi 2 yaitu : raster dan vektor.
12. *Network*, analisis terkait dengan sistem jaringan (*network analysis*) atau analisis terkait pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya (*resource*) dari suatu lokasi ke lokasi lainnya.

G. Bencana Alam

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dalam UU ini juga menyebutkan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi

bencana adalah melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang. Begitupula bentuk pencegahan, mitigasi dan pengawasan perlu berpedoman pada rencana tata ruang.

Bencana alam memberikan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat seperti jatuhnya korban jiwa dan hilangnya harta benda sedangkan dampak tidak langsung adalah terjadinya kerusakan di berbagai fasilitas umum misalnya, rumah sakit, sekolah, perkantoran dan lain sebagainya. Kerusakan fasilitas-fasilitas umum tersebut berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO (World Health Organization) diperlukan membangun rumah sakit yang aman terutama pada kondisi bencana atau darurat yang mana saat kondisi tersebut rumah sakit mampu untuk melakukan penyelamatan jiwa dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012).

Lokasi bangunan rumah sakit mengindikasikan perlunya menghindari adanya ancaman seperti banjir di lembah atau tanah longsor di sepanjang lereng. Identifikasi lokasi dan setiap potensi bahaya perlu dilakukan dengan tahap-tahapan yang tepat untuk memperkecil kerusakan bangunan. Selama kondisi darurat pemilihan lokasi yang tidak sesuai untuk bangunan rumah sakit dapat membatasi kegiatan operasional rumah sakit atau bahkan terjadi sebuah tragedi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012).

Berdasarkan Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit yang Aman Dalam Situasi Darurat dan Bencana, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012, Lokasi rumah sakit yang baik adalah sebagai berikut :

- A. Bangunan tidak berada di lokasi area berbahaya
 - a) Tidak ditepi lereng
 - b) Tidak dekat kaki gunung, rawan terhadap tanah longsor
 - c) Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi
 - d) tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif (kurang dari 10 meter)
 - e) tidak di daerah rawan tsunami
 - f) tidak di daerah rawan banjir
 - g) tidak dalam zona topan
 - h) tidak di daerah rawan badai
- B. Bangunan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengatasi bahaya terkait lokasi seperti drainase air hujan dan tanggul.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Judul/Penulis	Latar Belakang/ Tujuan Penelitian	Metode Analisis/ Variabel/Indikator	Hasil Penelitian
1	Analisis potensi peruntukan lahan rumah sakit dinilai dari aspek fisik dan kebutuhan penduduk dengan sistem informasi geografis di Kota Semarang oleh (Purnomo,	Latar belakang : Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan penduduk saat ini adalah rumah sakit. Peningkatan jumlah penduduk selaras dengan peningkatan kebutuhan rumah sakit. Olehnya itu diperlukan lokasi rumah sakit yang	Metode Analisis : 1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 2. <i>Analisis Overlay</i> Variabel : 1. Demografi - Jumlah Penduduk 2. Tata Guna Lahan - Kesesuaian lahan dengan tata guna lahan	1. Berdasarkan hasil analisis AHP menunjukkan kriteria dengan bobot terbesar adalah pertama tata guna lahan, kedua potensi longsor, ketiga kelas jalan, keempat daerah potensi banjir, kelima jarak untuk TPA dan TPS, keenam kemiringan lereng, ketujuh polusi udara dan kedelapan

	<p>Subiyanto, and Nugraha 2017).</p>	<p>sesuai agar dapat melayani semua kebutuhan penduduk.</p> <p>Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan rumah sakit ditinjau dari aspek fisik dan jumlah penduduk serta jumlah tempat tidur rawat inap rumah sakit</p>	<p>3. Aksesibilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelas jalan <p>4. Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemiringan lahan - Tingkat Kebisingan - Jarak dengan TPA dan TPS - Bebas Polusi - Bebas Banjir - Bebas Longsor 	<p>tingkat kebisingan.</p> <p>2. Berdasarkan hasil analisis overlay didapatkan 14 rumah sakit diklasifikasikan sangat sesuai sebagai lahan rumah sakit dan 5 rumah sakit diklasifikasikan sesuai sebagai lahan rumah sakit.</p> <p>3. Jika ditinjau dari jumlah penduduk dan rasio tempat tidur dengan rasio 1 tempat tidur : 1.500 penduduk maka didapatkan bahwa kebutuhan penduduk terhadap rumah</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				sakit sudah terpenuhi.
2	Analisis Spasial Pelayanan Fasilitas Sosial Ekonomi Di Kelurahan Giripurwo oleh (Marfu'ah et al. 2017).	<p>Latar Belakang :</p> <p>Perkembangan teknologi dunia khususnya terkait informasi spasial lebih mudah untuk dipahami terkait keruangan wilayah. Kelurahan Giripurwo memiliki fasilitas ekonomi dan sosial yang beragam maka sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode interpretasi citra satelit 2. Pengolahan data spasial 3. Analisa SIG <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak fasilitas ke permukiman 2. Sebaran fasilitas sosial ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas sosial ekonomi di Kelurahan Giripurwo sudah sesuai dengan kebutuhan Penduduk 2. Pola sebaran fasilitas sosial ekonomi tersebar dengan jangkauan lingkup 1 km.

		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan dan aksesibilitas pelayanan sosial ekonomi di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri.		
3	Analisis Spasial Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhadap Jumlah Pengunjung di Kota Blitar oleh (Purnomo,	Latar Belakang : Dengan adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi menyebabkan setiap daerah harus melakukan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Kota Blitar merupakan salah satu kota	Metode Analisis : 1. Analisis <i>Average Nearest neighbor</i> 2. Analisis <i>Buffering</i> 3. Analisis Korelasi Variabel : 1. Sebaran fasilitas 2. Jumlah	1. Berdasarkan analisis <i>nearest neighbor</i> didapatkan pola sebaran fasilitas kesehatan bersifat acak. 2. Korelasi yang kuat antara jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap permukiman dan jumlah

	Subiyanto, and Nugraha 2017)	<p>dengan angka harapan hidup yang tinggi dan program pelayanan kesehatan merupakan salah satu program utama pemerintah.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Menganalisis hubungan antara luas jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan terhadap permukiman dan jumlah pengunjung, pola sebara.</p>	<p>pasien/pengunjung</p> <p>3. Jumlah Penduduk</p>	<p>pengunjung. Semakin luas area jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan dengan permukiman maka maka semakin banyak jumlah kunjungan masyarakat.</p>
4.	Analisis Sebaran	Latar Belakang :	Metode Analisis :	1. Terdapat 32 kelurahan yang

	<p>Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Guna Meningkatkan Pelayanan Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat oleh (Sutaryo and Nugroho 2020).</p>	<p>Kota Depok merupakan daerah dengan jumlah penambahan penduduk yang pesat. Pertambahan penduduk yang pesat yang tidak dibarengi oleh fasilitas kesehatan yang memadai akan berpotensi terjadinya peningkatan jumlah kematian. Hipotesis awal menunjukkan bahwa sebaran fasilitas di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Depok tidak merata.</p>	<p>1. Analisis Kependudukan 2. Analisis Aksesibilitas 3. Analisis Ketersediaan Lahan</p> <p>Variabel :</p> <p>1. Sebaran Fasilitas Kesehatan 2. Jumlah Penduduk</p>	<p>belum mampu melayani masyarakat bila didasarkan pada radius jangkauan pelayanan dan terdapat pula 40 telah mampu melayani masyarakat didasarkan pada radius rata-rata.</p> <p>2. Terdapat 18 kelurahan mempunyai kinerja baik jika didasarkan pada keterjangkauan radius pencapaian area terbangun dan 4 kecamatan memiliki kinerja baik berdasarkan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelayanan kesehatan dilihat ketersediaan dan sebaran lokasi yang didasarkan pada RTRW, Standar SNI dan teori.</p>		<p>aksesibilitas pelayanan kesehatan.</p>
5	<p>Analisis Daya Layan Dan Efektifitas Lokasi Puskesmas Di Kabupaten Pati</p>	<p>Latar Belakang :</p> <p>Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pati cenderung masih berpusat disekitar pusat pemerintahan dan</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Skalogram 2. Analisis tetangga terdekat 3. Analisis kelas Daya Layan 4. Analisis tingkat kepuasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kesehatan di kabupaten Pati Masih kurang karena belum menjangkau keseluruhan wilayah. 2. Pola sebaran fasilitas berpola

	oleh (Yulianto, Hayati, and Aji 2016).	menimbulkan kekhawatiran akan tidak terjangkaunya layanan di daerah pelosok. Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui pola sebaran fasilitas kesehatan 2. Untuk mengetahui Daya layan puskesmas 3. Untuk mengetahui Efektifitas lokasi	masyarakat 5. Analisis efektifitas Lokasi Puskesmas Variabel : 1. Sebaran/Lokasi (absolut dan relatif) 2. Jumlah Fasilitas Kesehatan 3. Jumlah Penduduk 4. Jaringan Jalan	seragam. 3. Daya layan fasilitas kesehatan masih rendah. 4. Tingkat pelayanan kepada masyarakat sangat baik.
6	Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh	Latar Belakang : Jumlah kendaraan yang	Metode Analisis : 1. Interpretasi Citra Quickbird	Berdasarkan evaluasi dengan pertimbangan beberapa

	<p>Dan Sistem Informasi Geografis Untuk Evaluasi Lokasi Spbu Eksisting di Kota Yogyakarta oleh (Tomaskumoro and Widartono 2017).</p>	<p>meningkat membuat para Investor tertarik membangun SPBU di Kota Yogyakarta. Olehnya itu perlu dikaji kesesuaian lokasi dan persebarannya secara spasial.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan mengevaluasi lokasi SPBU yang berada di Kota Yogyakarta melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Analisis Buffer 3. Perhitungan VC (Volume/Capacity) 4. Perhitungan KDB dan KDH 5. Wawancara 6. Analisis <i>Overlay</i> 7. <i>Average Nearest Neighbor</i> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai 2. Rencana Tata Ruang Wilayah 3. KDB/KDH 4. Kepadatan lalu lintas 5. Jarak antar SPBU 	<p>parameter didapatkan bahwa satu SPBU memenuhi syarat, yaitu SPBU 44.551.04 Patangpuluhan.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

		Citra Penginderaan Jauh.		
7.	Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Eksisting di Kabupaten Mojokerto Menggunakan Sistem Informasi Geografis oleh (Hariyanto and Utami 2020).	Latar Belakang : Kabupaten Mojokerto termasuk memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan tentunya jumlah timbulan sampah juga semakin banyak namun jumlah TPA saat ini hanya 1 unit yaitu TPA Belahan Tengah Mojosari dengan luas hanya 5 hektar. Pengembangan TPA Belahan Tengah Mojosari	Metode Analisis : 1. Analisis <i>Overlay</i> 2. Analisis Buffer 3. Analisis Query Variabel : 1. Kemiringan Lereng 2. Jarak Terhadap Sungai 3. Penggunaan Lahan 4. Jarak Terhadap Permukiman 5. Jenis Tanah 6. Intensitas Curah Hujan 7. Bahaya Banjir	1. TPA Belahan Tengah Mojosari sudah sesuai dengan SNI yang ada. 2. TPA Belahan Tengah Mojosari telah menggunakan metode Sanitary Landfill namun kapasitas daya tampung dan pemrosesan masih sangat kecil. Hal itu menyebabkan tumpukan sampah yang menggunung maka diperlukan TPA Alternatif

		<p>mengalami hambatan karena terdapat temuan peninggalan Kerajaan Majapahit di lokasi tersebut. Di sisi lain seringkali terjadi <i>overload</i> yang dikhawatirkan terjadinya pencemaran lingkungan. Olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesesuaian TPA di Kabupaten Mojokerto.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		menganalisis kesesuaian dan kelayakan lokasi TPA eksisting di Kabupaten Mojokerto.		
8.	Analisis Spasial Untuk Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak Tsunami Selat Banten Tahun 2018 oleh (Utami, Wibowo, and Afiq 2019).	Latar Belakang : Pasca bencana tsunami di Selat Banten Tahun 2018 perlu dilakukan pembenahan berbagai sektor, salah satunya adalah masalah lokasi relokasi masyarakat. Perlu dilakukan penelitian dalam menentukan dimana lokasi	Metode Analisis : 1. Analisis Overlay 2. Analisis Buffer Variabel : 1. Kawasan Rawan Bencana 2. Lokasi Tempat Kerja 3. Sebaran fasilitas umum dan fasilitas sosial 4. Kepemilikan lahan	Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa lahan kosong masih banyak terdapat di Desa Mekarsari dan lokasi cenderung bertopografi datar dan lokasi tidak jauh dari lokasi awal. Berdasarkan tingkat aksesibilitas calon lokasi terbagi 3 kluster, yaitu kluster 1, kluster 2 dan kluster 3. Lokasi 1 strategis

		<p>relokasi yang tepat bagi masyarakat agar tidak terkena dampak tsunami kembali.</p> <p>Tujuan :</p> <p>Menentukan lokasi relokasi yang tepat bagi masyarakat yang terkena dampak tsunami di selat banten.</p>		<p>karena dekat dari fasos dan fasum, lokasi 2 kurang strategis namun masih memiliki akses jalan dan lokasi 3 masih butuh akses jalan.</p>
9.	<p>Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah oleh (Fisu 2018).</p>	<p>Latar Belakang : Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah pemekaran baru dianggap perlu membuat terobosan terkait</p>	<p>Metode Analisis :</p> <p>Makro</p> <p>1. Metode Skoring</p> <p>Mikro</p> <p>1. Metode Skoring</p>	<p>Ada 2 alternatif lokasi terminal berdasarkan RDTR Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Alternatif 1 terletak di Kecamatan Budong-Budong dan Alternatif 2 terletak</p>

		<p>kemudahan pelayanan publik. Salah satunya terkait pelayanan publik bidang transportasi.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mikro dan makro perencanaan lokasi terminal di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.</p> <p>:</p>	<p>2. Matriks Kinerja (Performance matrix)</p> <p>Variabel :</p> <p>Makro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Ruang 2. Transportasi 3. Dampask Sosial Budaya 4. Dampak Lalu Lintas 5. Teknik Konstruksi 6. Ekonomi dan finansial 7. Dampak Perekonomian Daerah <p>Mikro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi luas dan kontur 	<p>di Kecamatan Karossa.</p> <p>Berdasarkan hasil scoring analisis lokasi makro didapatkan bahwa lokasi alternatif 1 memiliki bobot lebih tinggi dari lokasi alternatif 2. Begitu pula berdasarkan hasil scoring analisis lokasi mikro didapatkan lokasi 1 tetap memiliki bobot paling tinggi daripada lokasi 2.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>daratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kestabilan tanah dasar 3. Kemudahan pembangunan 4. Kedekatan dengan akses jalan 5. Kesesuaian RTRW 6. Kedekatan dengan jaringan eksisting 7. Tata guan lahan 8. Kondisi hidrologi 	
10.	Analisis Lokasi Pembuangan	Latar Belakang : Seiring meningkatnya	Metoda Analisis : 1. Analisis Overlay	Berdasarkan hasil analisis melalui Sistem Informasi

<p>Limbah Padat Di Kota Tegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis oleh (Iryanthony, Santoso, and Aji 2018).</p>	<p>jumlah penduduk maka semakin meningkat pula jumlah konsumsi dan sampah. Jika kondisi ini tetap dibiarkan maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Sejak November 2015 sewa lahan TPA yang terletak di Kelurahan Muarareja telah berakhir oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam penentuan lokasi TPA</p>	<p>Variabel :</p> <p>Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geologi 2. Geomorfologi 3. Kelerengan 4. Drainase <p>Sosial Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi 2. Jarak dari Jalan Utama 3. Jarak dari Aliran sungai 4. Jarak dari Drainase 	<p>Geografis (GIS) didapatkan bahwa Kota Tegal tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA. Kota Tega; sebaiknya ikut mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan TPA Regional Bregasmalang sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>menggunakan Sistem Informasi Geografis</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lokasi TPA yang ideal di Kota Tegal.</p>		
11.	<p>Analisis Pola Persebaran Lokasi Perdagangan dan Jasa di Kota Tebing Tinggi oleh (Setiawan,</p>	<p>Latar Belakang :</p> <p>Dalam Perda RTRW Kota Tebing Tinggi diarahkan sebagai kota perdagangan dan jasa oleh karena itu dilakukan penelitian terkait</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif 2. Analisis Tetangga Terdekat <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola sebaran lokasi 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi jalan arteri sekunder dapat dikategorikan baik, jalur pedestrian sebagian terdapat di jalur arteri sekunder dan pemanfaatan ruang sebagian</p>

	LuthfiMuta'ali, and Sudrajat 2019).	<p>pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Tebing Tinggi.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan ruang menganalisis pola sebaran lokasi perdagangan dan jasa yang berlokasi di Jalan arteri sekunder Kota Tebing Tinggi</p>	<p>perdagangan dan jasa</p> <p>2. Jalan arteri sekunder</p>	<p>besar berupa permukiman, perdagangan dan jasa.</p>
12.	Analisis Penentuan Lokasi Dan Rute	<p>Latar Belakang :</p> <p>Tidak maksimalnya</p>	<p>Metode Analisis :</p> <p>1. Analisis Overlay</p>	<p>1. Didapatkan 3 zona layak TPA yang tersebar di 12</p>

	<p>TPA Berbasis Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Demak oleh (Daniyal, Wijaya, and Nugraha 2017)</p>	<p>pengelolaan sampah di Indonesia khususnya Kabupaten Demak menimbulkan meningkatnya volume sampah. Terdapat dua TPA di Kabupaten Demak, yaitu TPA Candisari dan TPA Kalikondang. TPA kondang sendiri mendapat penolakan dari masyarakat karena berdampak kepada kesehatan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu dilakukan penelitian terkait</p>	<p>2. Network Analyst</p> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geologi 2. Rawan Bencana 3. Topografi 4. Hidrologi 5. Penggunaan Lahan 	<p>Kecamatan dengan luas 4.492, 25 Ha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. TPA Kalikondang tidak layak untuk TPA 3. Rute dari TPS menuju TPA terpilih dalam kondisi baik dilalui truk.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>lokasi TPA yang baru sesuai dengan SNI 03-3241-1994.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui daerah yang layak sebagai TPA. 2. Untuk mengetahui kesesuai lokasi TPA eksisting 3. Mengetahui rute dari TPS ke TPA yang layak 		
13.	Analisis Lokasi	Latar belakang :	Metode Analisis :	1. Berdasarkan hasil analisis

<p>Rawan Bencana Kekeringan Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Blora Tahun 2017 oleh (Prasetyo, Suprayogi, and Hani'ah 2018)</p>	<p>Kabupaten Blora merupakan daerah yang sebagian besar geografisnya adalah pegunungan kapur. Kondisi ini menyebabkan sebagian daerah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air. Olehnya itu diperlukan suatu penanggulangan atau pencegahan sejak dini salah satunya dengan membuat peta sebaran daerah rawan bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembobotan/scoring 2. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) 3. Analisis Buffering <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Lahan 2. Kemiringan Lereng 3. Jenis Tanah 4. Curah Hujan 5. Jarak Lahan terhadap Sungai 	<p>didapatkan bahwa Kecamatan Kunduran merupakan daerah kekeringan paling berat dengan luas 10.266, 299 Ha sedangkan daerah kekeringan paling ringan adalah Kecamatan Bogorejo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kesesuaian data BPBD Kabupaten Blora dan data hasil pengolahan telah sesuai 88,82 % 3. Pada bulan April hingga
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		kekeringan Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian ini yaitu tersedianya informasi dalam bentuk peta sebaran daerah rawan bencana kekeringan di Kabupaten Blora.		September 2017 tingkat resiko kekeringan di Kabupaten Blora cukup tinggi
14	Analisis Pemilihan Lokasi Kantor Dan Workshop Baru Menggunakan Metode AHP Pada Cv. Young Interior oleh (Ayubi 2019).	Latar belakang : Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha adalah terkait pemilihan lokasi usaha. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan	Metode Analisis : 1. Metode Pembobotan <i>Expert Choice</i> 2. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) Variabel : 1. Biaya	Berdasarkan hasil pembobotan didapatkan lokasi Dieng merupakan lokasi dengan bobot tertinggi dan tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan tergolong rendah dengan CR< 0,1.

		untuk memperoleh lokasi terbaik untuk kantor dan workshop CV. Young Interior	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitas 3. Aksesibilitas 4. Potensi Pertumbuhan 	
15	Analisis Lokasi Pengembangan Sub Sistem Agropolitan Berbasis Komoditas Pala di Kabupaten Fakfak oleh (Hay and Aulia 2019).	<p>Latar Belakang :</p> <p>Potensi Komoditas Pala di Kabupaten Fakfak termasuk penyumbang terhadap PDRB Kabupaten Fakfak dan juga sebagai penyumbang produksi pala nasional. Olehnya itu diperlukan suatu pengembangan kasawan</p>	<p>Metode analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Overlay <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Fisik Dasar 2. Pengolahan 3. Sumber Daya Alam 4. Prasarana 5. Sumber Daya Manusia 6. Aksesibilitas 7. Sarana Komunikasi 	<p>Adapan pembagian sub sistem agropolitan di Kabupaten Fak-Fak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distrik Produksi meliputi : Distrik Fakfak Timur, Distrik Fakfak Timur Tengah dan Distrik Fakfak Tengah. 2. Distrik Pengolahan, meliputi : Distrik Fakfak

		<p>agropolitan berbasis komoditas pala. Diperlukan penelitian terkait analisis lokasi dalam pengembangan kawasan agropolitan tersebut.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan mengembangkan kawasan agropolitan berbasis komoditas pangan dengan pembagian tiga subsistem pengembangan, yaitu subsistem pengembangan</p>		<p>Timur, Distrik Fakfak Timur Tengah, Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Pariwari</p> <p>3. Distrik Pemasaran, meliputi : Distrik Fak-fak.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		produksi, subsistem pengembangan pengolahan dan subsistem pengembangan pemasaran.		
16.	Analisis Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan oleh (Kumalawati,	Latar Belakang : Kecamatan Alalak adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Barito Kuala. Kepadatan penduduk di Kecamatan Alalak tersebut diasumsikan berbanding lurus dengan timbulan sampah. Sistem	Metode Analisis : 1. Analisis <i>Overlay</i> 2. Metode Matching Variabel : 1. Aksesibilitas 2. Jarak 3. Biaya	1. Lokasi TPSS sekarang tidak sesuai karena ketersediaan TPSS yang ada hanya 3 buah dan berlokasi pada satu wilayah yaitu di Kelurahan Handil Bakti. 2. Distribusi lokasi TPSS juga sangat tidak sesuai dengan harapan

	<p>Arisanty, and Riswan 2016).</p>	<p>persampahan di Kabupaten Barito Kuala masih bersifat konvensional. Sistem ini masih membutuhkan lokasi lahan TPSS, TPS dan TPA yang cukup luas. Jika penentuan lokasi TPSS, TPS dan TPA tidak layak maka akan berdampak kepada lingkungan, olehnya itu dilakukan penelitian terkait terhadap lokasi khususnya untuk lokasi TPSS</p>		<p>masyarakat</p> <p>3. Sejumlah lokasi TPSS yang dekat dengan pasar dan permukiman dianggap seringkali tidak tertampung.</p> <p>4. Sejumlah penentu kebijakan masih belum merespon terkait permasalahan persampahan.</p>
--	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lokasi TPSS dan untuk mengetahui distribusi lokal TPSS lama dan TPSS lokasi baru yang berdampak kepada penentuan kebijakan</p>		
17	<p>Kajian Spasial Lokasi Berbelanja Di Kota Bandung oleh (Joewono and Andrianto 2019).</p>	<p>Latar Belakang :</p> <p>Aktivitas belanja merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi setiap orang. Setiap orang biasanya</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Thiessen Polygon</i> 2. Metode <i>Buffer</i> <p>Variabel :</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis dengan metode Thiessen Polygon didapatkan bahwa rata-rata luas daerah cakupan tempat belanja utama lebih luas dari</p>

		<p>mengunjungi lokasi bisnis/belanja untuk membeli suatu barang ataupun sekedar melihat-lihat. Ketika memilih suatu lokasi bisnis/belanja biasanya setiap orang memerlukan pertimbangan terkait lokasi dan harga. Untuk pertimbangan lokasi terkait jarak, durasi waktu dan biaya perjalanan.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak 2. Durasi Waktu 3. Biaya 	<p>tempat belanja alternatif. Metode buffer menunjukkan hasil sebaliknya rata-rata luas daerah cakupan belanja alternatif lebih luas dari tempat belanja utama. Hal itu menunjukkan bahwa tidak mutlak pelaku belanja akan memilih lokasi belanja terdekat dengannya. Hasil menunjukkan bahwa pemilihan lokasi belanja selain mempertimbangkan jarak juga mempertimbangkan durasi dan biaya perjalanan.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		menganalisis daerah cakupan lokasi belanja di Kota Bandung dan menganalisis pola perjalanan dari tempat belanja ke tempat tinggal dengan variabel biaya dan durasi perjalanan.		
18.	Evaluasi Kesesuaian Lokasi bank BRI di Wilayah Kantor Cabang Setiabudi Kota Bandung oleh	Latar Belakang : Lokasi sangat erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemilihan lokasi bank merupakan	Metode Analisis : 1. Analisis <i>Scoring</i> 2. Analisis <i>Overlay</i> Variabel : 1. Sebaran industri 2. Penggunaan lahan	Berdasarkan hasil <i>overlay</i> KCP Cihampelas di Kecamatan Coblong dan KCP Surya Sumantri di Wilayah Sukajadi dapat dikategorikan sangat sesuai. Selanjutnya di

	<p>(Fathurahman 2018).</p>	<p>sesuatu yang sulit dilakukan oleh pihak manajemen bank. Oleh karena itu diperlukan kajian terkait penentuan lokasi dengan bantuan sistem informasi geografis.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk menentukan kesesuaian lokasi bank BRI KCP baru di wilayah Unit Kerja Cabang Setiabudi, Kota Bandung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sebaran Perdagangan 4. Sebaran pendidikan 5. Penduduk 6. Pendapatan Penduduk 7. Kelas jalan 	<p>Kecamatan Sukasari juga sangat sesuai untuk dibangun KCP BRI lagi namun karena di daerah ini terdapat kantor Cabang BRI Setiabudi sehingga pelaksanaan itu sangat sulit untuk diterapkan.</p>
--	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.	<p>Pola Persebaran dan Keterjangkauan Lokasi Sekolah Terhadap Pemukiman dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan oleh (Mukhlis and</p>	<p>Sekolah sebagai saran utama bidang pendidikan harus terletak pada lokasi yang strategis dan tersebar secara merata. Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat berguna sebagai alat analisis perencanaan.</p> <p>Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pola persebaran dan keterjangkauan lokasi sekolah di Kecamatan</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis tetangga dekat (<i>Neighbour Nearest</i>) 2. Analisis <i>Buffer</i> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran Fasilitas Pendidikan (Sekolah) 2. Lokasi Permukiman 	<p>Berdasarkan hasil analisis tetangga dekat menunjukkan bahwa pola persebaran lokasi sekolah di Kecamatan Batauga adalah tersebar mengelompok dan hasil analisis <i>buffer</i> menunjukkan bahwa di Kecamatan Batauga, fasilitas tingkat TK telah melayani seluruh desa/kelurahan. Sementara untuk tingkat SMP/MTs hanya melayani 75 % setiap permukiman di masing-masing desa/kelurahan dan untuk tingkat</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Harudu 2019).	Batauga Kabupaten Buton Selatan.		SMA telah melayani 91,6 % wilayah desa/kelurahan.
20.	Identifikasi Lokasi Sebaran Pencemaran Air di Kawasan Kota Pontianak oleh (Debataraja, Kusnandar, and Nusantara 2018)	Latar Belakang : Pola pengelolaan lahan sangat mempengaruhi perubahan kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah. Peningkatan pemanfaatan lahan di Kota Pontianak berdampak kepada penurunan daya dukung lahan salah satu yang mengalami peningkatan tersebut	Metode Analisis : 1. Analisis Overlay Variabel : 1. Batas Administrasi 2. Luas Wilayah 3. Jumlah Penduduk 4. Kepadatan Penduduk	Berdasarkan analisis overlay didapatkan 58 titik sampel lokasi pengambilan sampel air permukaan.

		<p>adalah lahan untuk permukiman. Hal itu berdampak kepada kualitas air di Kota Pontianak</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi pengambilan sampel air di Kota Pontianak dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).</p>		
21.	Analisis Penentuan Lokasi Evakuasi Bencana Banjir	<p>Latar Belakang :</p> <p>Pada tahun 2016 terjadi banjir di beberapa wilayah</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>Overlay</i> 2. Analisis <i>Buffer</i> 	<p>Berdasarkan hasil analisis menggunakan SIG dan metode SAW didapatkan 6 lokasi terbaik.</p>

<p>dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan Metode Simple Additive Weigthing oleh (Lumban Batu and Fibriani 2017).</p>	<p>Kota Surakarta. Hal itu disebabkan curah hujan yang tidak menentu, kurang berfungsinya wilayah resapan air dan kurangnya mitigasi menjadi salah satu alasan terjadinya banjir di Kota Surakarta. Oleh karena itu perlu dilakukan antisipasi sedini mungkin untuk meminimalisir dampak banjir salah satunya menentukan lokasi evakuasi.</p>	<p>3. Metode <i>Simple Additive Weigthing</i></p> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana Banjir dan Serupa 2. Jarak jalan 3. Jarak Permukiman 4. Jarak DAS 5. Tata Guna Lahan 6. Curah Hujan 	<p>Lokasi 1 dan 2 berada di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan; lokasi 3 berada di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan. lokasi 4 berada di Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, lokasi 5 berada di Kelurahan Buluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon dan lokasi 6 berada di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan menentukan lokasi evakuasi dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan Metode <i>Simple Additive Weighing</i></p>		
22.	<p>Analisis Lokasi dan Fasilitas Apartemen Kalibata City serta Implikasinya Terhadap Harga Jual dan Harga Sewa yang</p>	<p>Latar Belakang :</p> <p>Semakin meningkatnya penduduk di kota jakarta menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaan lahan. Kondisi ini memungkinkan pemerintah</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Chi – Square Test 2. Analisis <i>Crosstabs</i> (Tabulasi Silang) <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi dan Aksesibilitas Apartemen 	<p>Apartemen Kalibata <i>City</i> berada dekat dengan pusat aktivitas dan strategis serta memiliki fasilitas yang lengkap dari fasilitas dasar hingga <i>Shopping Centre</i> namun harga jual dan harga sewa masih tergolong sangat terjangkau</p>

	<p>Ditawarkan oleh (Nurbonita and Haryanto 2017).</p>	<p>untuk mencanangkan konsep hunian vertical salah satunya adalah Apartemen Kalibata City. Lokasi yang strategis dan fasilitas yang lengkap menarik bagi penulis untuk mengkajinya.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lokasi dan fasilitas Apartemen Kalibata City dan impilkasinya terhadap harga sewa dan</p>	<p>2. Karakteristik dan persepsi penghuni</p> <p>3. Kondisi dan ketersediaan fasilitas</p> <p>4. Harga jual dan harga sewa</p>	<p>karena apartemen ini merupakan apartemen bersubsidi. Banyak penghuni lebih memanfaatkan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi disebabkan waktu dan biaya yang diperlukan relatif lebih rendah.</p>
--	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		harga jualnya.		
23.	Analisis Lokasi Industri Serbuk Karet Alam Teraktivasi (SKAT) untuk Aspal Karet oleh (Ibrahim, Rifin, and Djohar 2018).	Latar Belakang : Serbuk Karet Alam Teraktivasi (SKAT) mulai dicanangkan di Indonesia. Hal itu menjadi peluang yang bagus bagi perusahaan bidang aspal. Oleh karena itu diperlukan analisis lokasi untuk mendukung program	Metode Analisis : 1. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) Variabel : 1. Pasar (jalan daerah, jalan nasional) 2. Bahan baku (jarak) 3. Biaya (harga lahan, UMP)	Berdasarkan hasil analisis AHP menunjukkan bahwa lokasi terbaik pendirian SKAT adalah di Semarang. Lokasi tersebut memiliki radius pasar 600 km, panjang jalan nasional 5.611 Km dan jalan daerah 109.075 km, harga lahan dan upah tenaga kerja murah.

		tersebut. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi yang terbaik pembangunan pabrik SKAT.		
24.	Analisa Faktor Penentu Lokasi Pasar Sidotopo Wetan oleh (Magita 2020).	Latar Belakang : Pasar merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat, terkhusus Pasar Sidotopo Wetan. Pasar yang berada pada lokasi strategis akan dapat mempengaruhi kunjungan	Metode Analisis : <i>1. Theoretical analytic</i> <i>2. Empirical analytic</i> <i>3. Analytical Hierarchy Process (AHP)</i> Variabel : 1. Kondisi Fisik 2. Sosial – Ekonomi	Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik AHP didapatkan kriteria yang paling berpengaruh adalah faktor sosial ekonomi, kemudian faktor sarana dan prasarana menjadi kriteria yang paling berpengaruh kedua, kemudian faktor yang ketiga

		<p>masyarakat .</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi Pasar Sidotopo Wetan berdasarkan faktor lokasi penentu pasar.</p>	<p>3. Sarana dan Prasarana</p> <p>4. Kebijakan dan Pemerintahan</p>	<p>adalah faktor kebijakan dan pemerintahan dan faktor keempat yang terakhir adalah faktor kondisi fisik wilayah.</p>
25.	<p>Pengaruh Pola Sebaran Sarana dan Prasarana Kesehatan Terhadap Aksesibilitas Pelayanan</p>	<p>Latar Belakang :</p> <p>Tingkat aksesibilitas akan sangat mempengaruhi wilayah pelayanan sarana kesehatan. Bagi masyarakat lokasi sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p>Metode Analisis :</p> <p>1. Analisis Tetangga Dekat</p> <p>2. Analisis Indeks Aksesibilitas</p> <p>3. Analisi Daya Layan</p> <p>Variabel :</p> <p>1. Masyarakat</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pola sebaran Rumah Sakit dan Apotek masih belum merata. Dari segi jarak aksesibilitas menuju pelayanan kesehatan sebagian besar mudah dijangkau namun</p>

	<p>Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal 2016 oleh (Aghnia et al. 2018).</p>	<p>dari segi transportasi mudah dijangkau tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal termasuk tertinggi ke 5 di Jawa tengah namun jumlah sarana dan prasarana kesehatan masih sedikit. Hal itu menunjukkan bahwa pelayanan sarana dan prasarana kesehatan masih belum merata dan berdampak kepada sulitnya</p>	<p>2. sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p>kondisi jalan di beberapa kecamatan masih berlubang atau belum menggunakan beton/aspal.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>jangkauan masyarakat ke lokasi sarana dan prasarana kesehatan.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola sebaran sarana dan prasarana kesehatan terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tegal tahun 2016.</p>		
26.	Analisis Spasial Terhadap Fasilitas	<p>Latar Belakang :</p> <p>Sebuah kota yang baik</p>	<p>Metode Analisis :</p> <p>1. Analisis Skoring</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kota bitung</p>

	<p>Umum untuk Memenuhi Kebutuhan Difabel di Kota Bitung oleh (Abdullah, Sangkertadi, and Mastutie 2019).</p>	<p>perlu menyediakan setiap kebutuhan yang baik untuk semua kelompok masyarakat salah satunya untuk masyarakat difabel. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terkait kebutuhan masyarakat difabel di Kota Bitung sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa</p>	<p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas Transportasi 2. Rehabilitasi 3. Bantuan Alat 4. Pendidikan Formal 5. Peran serta Pembangunan 6. Lapangan Pekerjaan 	<p>dapat dikategorikan sebagai kota tidak ramah difabel atau kota yang belum memenuhi kebutuhan difabel.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		besar tingkat kesesuaian Kota Bitung sebagai kota ramah difabel.		
27.	Analisis Spasial Penentuan Potensi Lokasi Peruntukan Lahan Pembangunan Puskesmas Kota Prabumulih oleh (Krama et al. 2020).	Latar Belakang : Potensi masalah sosial seperti ketimpangan pelayanan kesehatan masyarakat diakibatkan oleh ketidakseimbangannya pemerataan penduduk di Kota Prabumulih. Hal itu berdampak tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan salah	Metode Analisis : 1. <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) 2. Analisis <i>Scoring</i> /pembobotan Variabel : 1. Kemiringan Lereng 2. Rawan Erosi 3. Rawan Banjir 4. Rawan Cuaca Ekstrim 5. Rentan Gempa Bumi	Berdasarkan hasil analisis didapatkan parameter bobot terbesar adalah aksesibilitas kemudian jumlah penduduk. Aksesibilitas menjadi faktor yang penting karena dipengaruhi oleh kondisi geografis Kota Prabumulih. Adapun wilayah yang sangat berpotensi sebagai lokasi pembangunan puskesmas di Kota Parabumulih adalah di

		<p>satunya adalah Fasilitas Kesehatan Puskesmas.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan menentukan lokasi yang berpotensi untuk pembangunan puskesmas di Kota Prabumulih.</p>	<p>6. Rawan Radiasi SUTT</p> <p>7. Aksesibilitas</p> <p>8. Zona Kedekatan Fasilitas Umum</p> <p>9. Jumlah Penduduk</p>	<p>Kecamatan Prabumulih Timur dan wilayah yang tidak berpotensi sebagai lokasi pembangunan puskesmas adalah Kecamatan Prabumulih Utara.</p>
28.	<p>Analisis Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis <i>Geography</i></p>	<p>Latar Belakang :</p> <p>Terjadi peningkatan dinamika pembangunan di Kota Tomohon. Peningkatan tersebut juga</p>	<p>Metode Analisis :</p> <p>1. Analisis <i>Overlay</i></p> <p>2. Analisis <i>Buffering</i></p> <p>3. Thiessen</p> <p>4. <i>Network Analysis</i></p>	<p>1. Ada 3 tahapan pemilihan lokasi TPA dengan menggunakan <i>Geography Information System (GIS)</i> berdasarkan standar yang</p>

<p><i>Information System</i> (GIS) di Kota Tomohon oleh (Pattiasina, Tondobala, and Lakat 2018).</p>	<p>diiringi dengan peningkatan produksi sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai tempat pemrosesan akhir perlu dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tahapan pemilihan lokasi (Tempat 	<p>5. <i>Geotagging</i></p> <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan Bencana Longsor 2. Gunung Api 3. Banjir 4. Hidrogeologi 5. Jenis Tanah 6. Hidrologi 7. Kawasan Lindung 8. Penggunaan Lahan 9. Kawasan Strategis 10. Curah Hujan 11. Jaringan Jalan 	<p>berlaku, yaitu dengan cara <i>buffering</i> dan <i>overlay</i> (pendekatan <i>kuantitatif binary</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan lokasi TPA yaitu kawasan rawan bencana, penggunaan lahan, kawasan strategis, jarak terhadap permukiman; dan 3. Kelurahan Tara-Tara 1 Kecamatan Tomohon Barat merupakan alternatif lokasi TPA, lokasi ini terpilih karena berdekatan dengan TPA
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Pembuangan Akhir) TPA dengan menggunakan <i>Geography Information System</i> (GIS) berdasarkan standar yang berlaku.</p> <p>2. Menganalisis faktor-faktor penentu berdasarkan karakteristik wilayah dalam pemilihan lokasi (Tempat Pembuangan Akhir) TPA.</p> <p>3. Mengetahui lokasi</p>	12. Persampahan	eksisting Tomohon.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------

		alternatif (Tempat Pembuangan Akhir) TPA di Kota Tomohon.		
29	Penentuan Lokasi Kawasan Industri Tekstil Terpadu di Kabupaten Majalengka oleh (Rianto and Santoso 2018).	Latar belakang : Kawasan industri tekstil Jawa Barat direncanakan akan dikembangkan di Kabupaten Majalengka. Kementerian Republik Indonesia mengarahkan untuk merelokasi kawasan industri dari bandung selatan ke Kabupaten Majalengka. Permasalahan	Metode Analisis : 1. Analisis Delphi 2. Analisis AHP 3. Analisis <i>Overlay</i> Variabel : 1. Kemiringan Lahan/Topografi 2. Jenis Tanah 3. Penggunaan Lahan 4. Harga Lahan 5. Bencana Gempa Bumi	1. Hasil analisis delphi menunjukkan bahwa Untuk menentukan lokasi kawasan industri tekstil di Kabupaten Majalengka perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu : faktor tapak/lahan, faktor resiko bencana, faktor utilitas, faktor aksesibilitas dan prinsip pengembangan kawasan.

		<p>saat ini belum ada kawasan yang direncanakan oleh Kabupaten Majalengka sebagai kawasan industri tekstil di daerahnya. Olehnya itu perlu ditentukan lokasi kawasan industri tekstil yang sesuai.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk kawasan industri tekstil terpadu di Kabupaten Majalengka.</p>	<p>6. Bencana Banjir 7. Bencana Longsor 8. Jaringan Listrik 9. Jaringan Air Bersih 10. Jaringan Drainase 11. Jaringan Jalan 12. Lebar Jalan 13. Perkerasan Jalan 14. Kesesuaian Rencana Tata Ruang 15. Rantai Nilai Industri.</p>	<p>2. Berdasarkan hasil analisis AHP menunjukkan bahwa faktor tapak/lahan mempunyai tingkat kepentingan paling tinggi, kemudian prinsip pengembangan kawasan, kemudian resiko bencana, kemudian utilitas dan terakhir aksesibilitas.</p> <p>3. Berdasarkan hasil analisis overlay didapatkan bahwa lahan yang sesuai dijadikan kawasan industry tekstil terpadu adalah di Kecamatan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Jatitujuh dan Kecamatan Ligung.
30.	Analisis Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alternatif Kecamatan Wates Kabupaten Kediri oleh (Jonatan and Zain 2019).	<p>Latar Belakang :</p> <p>Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Wates, maka timbulan sampah juga semakin meningkat. Olehnya itu perlu dilakukan peneltian terkait penentuan Lokasi TPA.</p> <p>Tujuan Penelitian :</p> <p>Penelitian ini bertujuan</p>	<p>Metode Analisis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>Overlay</i> 2. Analisis Proyeksi <p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Tanah 2. Curah Hujan 3. Kemiringan Lereng 4. Jaringan Sungai 5. Penggunaan Lahan 6. Jumlah Penduduk 7. Timbulan Sampah 8. Permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil <i>overlay</i> dan matriks kesesuaian menunjukkan TPA yang sudah ada tidak sesuai dengan peruntukannya dan seharusnya tidak boleh dibangun TPA . 2. Proyeksi kebutuhan lahan di Kecamatan Wates sangat besar dan kemungkinan akan mengganggu eksisting lahan produktif.

		<p>untuk mengetahui :</p> <p>1.1 kesesuaian lahan TPA terhadap lingkungan di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri</p> <p>2.1 Proyeksi TPA untuk lima tahun kedepan</p> <p>3.1 Lokasi alternatif pembangunan TPA</p>		<p>3. 3 dari 5 kesesuaian pada matriks kesesuaian menunjukkan tidak sesuai sehingga Kecamatan Wates tidak bisa dipakai untuk TPA. Terdapat 98 calon lokasi TPA dengan desa Joho sebagai lokasi yang terluas.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Kerangka Konsep

